

EFEKTIVITAS PENERAPAN *BLENDED LEARNING* DI WILAYAH KEPULAUAN PADA PELATIHAN DASAR CPNS PROVINSI MALUKU**Marsye Fera Kalahatu**

BPSDM Provinsi Maluku

Info Artikel

Received:
18 Maret 2026
Accepted:
20 Juni 2026
Published:
10 Juli 2026

Kata Kunci:
Blended learning,
Latsar CPNS,
Efektivitas
Pembelajaran,
Wilayah Kepulauan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan metode *blended learning* dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) di Provinsi Maluku, khususnya pada wilayah kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 172 responden alumni Latsar CPNS Angkatan II Tahun 2025 dari Kota Tual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *blended learning* tergolong cukup efektif, dengan 63% responden menyatakan efektif. Dari sisi aksesibilitas dan infrastruktur, pembelajaran berjalan cukup baik meskipun masih terkendala jaringan internet. Desain pembelajaran dinilai baik, terutama pada kejelasan instruksi dan keterpaduan antara pembelajaran daring dan tatap muka. Pada aspek kemandirian dan interaksi, metode ini mampu mendorong motivasi belajar mandiri dan kolaborasi peserta. Sementara itu, pada dimensi hasil pembelajaran, *blended learning* meningkatkan kepuasan dan ketercapaian tujuan, meskipun masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teori dan praktik. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan konektivitas internet dan sarana pendukung. Dengan demikian, *blended learning* merupakan solusi strategis untuk pelatihan ASN di wilayah kepulauan, namun memerlukan penguatan infrastruktur, optimalisasi desain pembelajaran, serta peningkatan kesiapan peserta agar implementasinya lebih optimal.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the blended learning method in the Basic Training for Civil Servant Candidates (Latsar CPNS) in Maluku Province, particularly in archipelagic areas with limited infrastructure and technological access. The study employed a descriptive qualitative approach using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. Data were collected through questionnaires, interviews, observations, and documentation involving 172 respondents who were alumni of Latsar CPNS Batch II in 2025 from Tual City. The results indicate that blended learning is moderately effective, with 63% of respondents perceiving it as effective. In terms of accessibility and infrastructure, the learning process runs fairly well despite internet connectivity constraints. The instructional design is considered good, particularly in the clarity of instructions and the integration of online and face-to-face learning. Regarding independence and interaction, the method promotes self-directed learning and participant collaboration. In terms of learning outcomes, blended learning improves participant satisfaction and the achievement of learning objectives, although a gap between theoretical understanding and practical application remains. The main challenges include limited internet connectivity and inadequate supporting facilities. Therefore, blended learning can serve as a strategic solution for civil servant training in archipelagic regions; however, it requires improvements in infrastructure, instructional design, and participant readiness to achieve optimal implementation.

PENDAHULUAN

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) merupakan tahapan wajib yang harus diikuti oleh setiap Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil. Penyelenggaraan Latsar CPNS bertujuan untuk membentuk aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, serta memiliki karakter yang sesuai dengan nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK. Penyelenggaraan pelatihan ini mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS yang menekankan pentingnya penguatan kompetensi ASN melalui proses pembelajaran yang sistematis, terstruktur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika lingkungan kerja birokrasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan peningkatan efektivitas pelatihan, Lembaga Administrasi Negara melakukan pembaruan dalam mekanisme penyelenggaraan Latsar CPNS melalui (Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6/K.1/HKM.02.3/2026) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, yang menekankan penerapan model *blended learning*. Pendekatan ini merupakan integrasi antara pembelajaran daring (dalam jaringan) dan pembelajaran tatap muka yang dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas proses pembelajaran tanpa mengurangi kualitas capaian kompetensi peserta pelatihan.

Blended learning pada Latsar CPNS mengombinasikan beberapa metode pembelajaran, yaitu pembelajaran mandiri melalui *Massive Open Online Course* (MOOC), pembelajaran jarak jauh melalui sistem *distance learning*, serta pembelajaran klasikal atau tatap muka secara langsung. Model ini memungkinkan peserta untuk mempelajari materi secara mandiri melalui platform digital atau *Learning Management System* (LMS) sebelum mengikuti sesi diskusi, pendalaman materi, dan praktik bersama fasilitator atau widyaiswara. Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan fleksibilitas pembelajaran, tetapi juga memungkinkan optimalisasi penggunaan sumber daya serta efisiensi waktu dan anggaran penyelenggaraan pelatihan.

Secara konseptual, *blended learning* didefinisikan sebagai model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi digital atau daring dalam suatu desain pembelajaran yang terencana dan saling melengkapi (Graham, 2006; Hrastinski, 2019). Pendekatan ini memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih fleksibel, interaktif, dan berpusat pada peserta didik (*learner-centered learning*), sekaligus memanfaatkan keunggulan interaksi langsung dan pembelajaran berbasis teknologi (Garrison & Vaughan,

2012a). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan *blended learning* dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, partisipasi peserta, serta capaian hasil belajar. Misalnya, penelitian (Ansar et al., 2023) menunjukkan bahwa penerapan *blended learning* mampu meningkatkan kompetensi peserta serta memberikan respons positif terhadap proses pembelajaran karena menggabungkan fleksibilitas pembelajaran daring dengan interaksi langsung dalam pembelajaran tatap muka. Selain itu, penelitian (Hidayati et al., 2023) menemukan bahwa *blended learning* secara signifikan meningkatkan hasil belajar peserta melalui kombinasi aktivitas daring dan tatap muka yang memungkinkan peningkatan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Boelens et al., (2017), yang menyatakan bahwa integrasi pembelajaran daring dan tatap muka dapat meningkatkan keterlibatan peserta serta efektivitas proses pembelajaran.

Meskipun demikian, efektivitas penerapan *blended learning* sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas desain pembelajaran, tingkat kemandirian belajar peserta, serta interaksi antara peserta dan pengajar. Dalam konteks pelatihan aparatur pemerintah, evaluasi efektivitas metode *blended learning* juga sering dikaitkan dengan tingkat kepuasan peserta, peningkatan pemahaman materi, serta capaian kompetensi yang diperoleh selama pelatihan. Studi lain mengenai pelatihan berbasis *blended learning* menunjukkan bahwa metode ini mampu meningkatkan hasil pembelajaran peserta secara signifikan apabila didukung oleh desain pembelajaran yang baik dan dukungan teknologi yang memadai (Bilqis, 2025).

Untuk menilai efektivitas suatu program pelatihan, salah satu pendekatan evaluasi yang sering digunakan adalah Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam, (2003). Model ini menekankan bahwa evaluasi program harus dilakukan secara komprehensif melalui empat komponen utama. Komponen *context* digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan, tujuan program, serta kebutuhan peserta pelatihan. Komponen *input* berfokus pada penilaian terhadap sumber daya yang digunakan dalam program pelatihan, seperti kurikulum, sarana prasarana, teknologi pembelajaran, serta kesiapan peserta dan fasilitator. Komponen *process* mengevaluasi pelaksanaan program pembelajaran, termasuk metode pembelajaran, interaksi peserta, serta pelaksanaan kegiatan pelatihan. Sementara itu, komponen *product* digunakan untuk menilai hasil atau dampak dari program pelatihan, seperti peningkatan kompetensi peserta serta capaian hasil pembelajaran. Model evaluasi ini dinilai relevan untuk mengkaji efektivitas implementasi *blended learning* karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai

perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil dari suatu program pelatihan.

Namun demikian, penerapan *blended learning* tidak selalu berjalan optimal di semua wilayah, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi dan konektivitas internet. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dengan karakteristik geografis kepulauan seperti Provinsi Maluku, yang terdiri dari sekitar 1.338 pulau dengan kondisi akses transportasi dan infrastruktur digital yang belum merata. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah seringkali menyebabkan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring, seperti gangguan saat sesi pembelajaran sinkronus (*synchronous learning*), keterlambatan akses materi pembelajaran, serta keterbatasan partisipasi aktif peserta dalam diskusi daring.

Dalam konteks tersebut, penerapan *blended learning* pada Latsar CPNS di Provinsi Maluku menjadi sebuah strategi penting untuk menjawab tantangan geografis wilayah kepulauan. Melalui pendekatan ini, peserta dari daerah terpencil tidak harus meninggalkan tempat tugas dalam waktu yang lama pada tahap awal pelatihan. Hal ini berpotensi memberikan efisiensi dalam aspek waktu, biaya perjalanan, dan anggaran pelatihan, sekaligus menjaga kesinambungan proses pembelajaran. Akan tetapi, keberhasilan implementasi *blended learning* di wilayah kepulauan masih memerlukan evaluasi yang komprehensif untuk mengetahui sejauh mana metode ini dapat berjalan secara efektif dalam kondisi keterbatasan infrastruktur dan konektivitas internet.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *blended learning* cenderung efektif diterapkan pada wilayah dengan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai dan akses internet yang stabil (Kusmanto et al., 2025). Namun demikian, kajian mengenai efektivitas penerapan *blended learning* pada konteks wilayah kepulauan dengan disparitas infrastruktur digital masih relatif terbatas.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *blended learning* efektif meningkatkan hasil belajar, kepuasan peserta, dan fleksibilitas pembelajaran (Ansar et al., 2023; Hidayati et al., 2023; Bilqis, 2025). Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada konteks pendidikan tinggi, pelatihan umum, atau wilayah dengan infrastruktur digital yang relatif memadai. Kajian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas *blended learning* pada penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) di wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses internet masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji efektivitas *blended learning* pada konteks pelatihan ASN di wilayah kepulauan Maluku melalui pendekatan evaluasi CIPP yang mengintegrasikan aspek

aksesibilitas dan infrastruktur, desain pembelajaran dan instruksional, kemandirian dan interaksi peserta, serta dampak hasil pelatihan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penerapan metode *blended learning* dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) di Provinsi Maluku menjadi suatu pendekatan yang strategis untuk menjawab tantangan geografis wilayah kepulauan. Namun demikian, efektivitas penerapan metode ini masih perlu dikaji secara lebih mendalam mengingat adanya keterbatasan infrastruktur teknologi, ketimpangan akses internet, serta perbedaan kesiapan peserta dalam mengikuti pembelajaran berbasis digital. Selain itu, keberhasilan implementasi *blended learning* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas desain pembelajaran, tingkat kemandirian belajar peserta, serta intensitas interaksi dalam proses pembelajaran (Garrison & Vaughan, 2012b). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana efektivitas penerapan *blended learning* dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Maluku apabila ditinjau dari beberapa dimensi utama, yaitu aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur pembelajaran, desain pembelajaran dan instruksional, kemandirian serta interaksi peserta dalam proses pembelajaran, serta dampaknya terhadap hasil pembelajaran peserta pelatihan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan efektivitas penerapan metode *blended learning* dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) di Provinsi Maluku. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi peserta terhadap pelaksanaan *blended learning* berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner. Data kuantitatif kemudian didukung oleh hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai data pelengkap untuk memperkuat interpretasi hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, model evaluasi CIPP dioperasionalkan ke dalam empat dimensi penelitian yang disesuaikan dengan karakteristik *blended learning* pada Pelatihan Dasar CPNS. Operasionalisasi tersebut dilakukan untuk memudahkan pengukuran efektivitas pembelajaran berdasarkan aspek yang relevan dengan pelaksanaan *blended learning* di wilayah kepulauan. Adapun hubungan antara komponen model CIPP dengan dimensi penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Model Evaluasi CIPP

Komponen CIPP	Dimensi Penelitian	Indikator
Context	Aksesibilitas dan Infrastruktur	Akses internet, LMS, fasilitas belajar
Input	Desain Pembelajaran dan Instruksional	Materi pembelajaran, kejelasan instruksi, integrasi pembelajaran daring dan luring
Process	Kemandirian dan Interaksi Peserta	Komunikasi dengan fasilitator, kolaborasi peserta, partisipasi dalam pembelajaran
Product	Dampak Hasil Pelatihan	Kepuasan peserta, ketercapaian tujuan pembelajaran, peningkatan pemahaman

Sumber: Stufflebeam, D. L (2003)

Penelitian dilaksanakan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku sebagai lembaga penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peserta yang telah mengikuti seluruh tahapan pembelajaran dalam program Latsar CPNS berbasis *blended learning*. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 172 orang yang merupakan alumni Latsar CPNS Angkatan II Tahun 2025 yang berasal dari Kota Tual. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka telah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran *blended learning* yang meliputi pembelajaran daring melalui *Learning Management System* (LMS), pembelajaran jarak jauh, serta pembelajaran klasikal atau tatap muka sehingga dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan pengumpulan data melalui interaksi dengan responden, observasi terhadap proses pembelajaran, serta penelaahan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan. Kehadiran peneliti di lapangan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi nyata pelaksanaan *blended learning* dalam penyelenggaraan Latsar CPNS di Provinsi Maluku.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan

kepada beberapa informan kunci, seperti widyaiswara dan pengelola pelatihan, untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran *blended learning* serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Selain itu, kuesioner digunakan untuk memperoleh tanggapan dari 172 responden alumni Latsar CPNS Angkatan II Tahun 2025 dari Kota Tual terkait pengalaman mereka dalam mengikuti pembelajaran *blended learning*, khususnya yang berkaitan dengan aspek aksesibilitas dan infrastruktur pembelajaran, desain pembelajaran dan instruksional, kemandirian serta interaksi peserta dalam proses pembelajaran, serta dampak pembelajaran terhadap hasil belajar peserta. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pembelajaran baik dalam kegiatan pembelajaran daring melalui *Learning Management System* (LMS) maupun kegiatan pembelajaran klasikal atau tatap muka. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Latsar CPNS, seperti pedoman pelatihan, kurikulum pelatihan, laporan kegiatan pelatihan, serta data peserta pelatihan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti tahapan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola serta hubungan antar temuan penelitian. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap selama proses penelitian berlangsung untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan *blended learning* dalam penyelenggaraan Latsar CPNS di Provinsi Maluku.

Untuk memastikan keabsahan data penelitian, dilakukan teknik pemeriksaan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti peserta pelatihan, widyaiswara, serta pengelola pelatihan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Melalui teknik tersebut diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan *blended learning* dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Maluku.

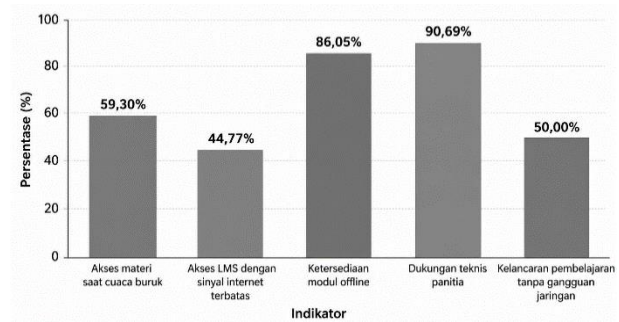
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan metode *blended learning* dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) di Provinsi Maluku berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada 172 responden alumni Latsar CPNS Angkatan II Tahun 2025 yang berasal dari Kota Tual. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan pengalaman dan persepsi responden terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis *blended learning* yang mereka ikuti selama proses pelatihan. Pembahasan hasil penelitian difokuskan pada empat dimensi utama yang menjadi indikator efektivitas pembelajaran, yaitu dimensi aksesibilitas dan infrastruktur, dimensi desain pembelajaran dan instruksional, dimensi kemandirian dan interaksi peserta, serta dimensi dampak hasil pembelajaran. Keempat dimensi tersebut dianalisis untuk mengetahui sejauh mana penerapan *blended learning* mampu mendukung proses pembelajaran yang efektif dalam konteks wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku. Selanjutnya, hasil analisis dari setiap dimensi tersebut akan diintegrasikan untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat efektivitas metode *blended learning* dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Maluku.

Dimensi Aksesibilitas dan Infrastruktur

Hasil analisis kuesioner pada dimensi aksesibilitas dan infrastruktur menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai pelaksanaan *blended learning* dalam Pelatihan Dasar CPNS telah berjalan cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan kondisi jaringan internet di wilayah kepulauan.

Gambar 1 menunjukkan hasil penilaian responden terhadap aspek aksesibilitas dan infrastruktur dalam pelaksanaan *blended learning* pada Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Maluku. Secara umum, indikator dengan tingkat penilaian tertinggi adalah dukungan teknis panitia (90,69%) dan ketersediaan modul offline (86,05%). Sementara itu, indikator akses LMS dengan sinyal internet terbatas memperoleh persentase terendah (44,77%), yang mengindikasikan bahwa keterbatasan konektivitas masih menjadi tantangan utama dalam implementasi *blended learning* di wilayah kepulauan.



Gambar 1. Hasil Penilaian Responden pada Dimensi Aksesibilitas dan Infrastruktur

Sumber: Hasil olahan data penelitian (2025)

Pada indikator stabilitas akses materi daring saat cuaca buruk, mayoritas responden (59,30%) menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa materi pembelajaran tetap dapat diakses meskipun kondisi cuaca kurang mendukung. Namun demikian, masih terdapat sebagian responden yang mengalami kesulitan akses yang disebabkan oleh gangguan jaringan internet yang sering terjadi di wilayah kepulauan. Kondisi serupa juga terlihat pada indikator akses terhadap *Learning Management System* (LMS) dengan sinyal internet terbatas, di mana 44,77% responden menyatakan setuju dan sangat setuju, sementara sebagian lainnya masih merasakan keterbatasan akses akibat kualitas jaringan yang tidak stabil. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur jaringan masih menjadi tantangan dalam implementasi pembelajaran daring di wilayah kepulauan.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan modul pembelajaran offline menjadi salah satu faktor yang sangat membantu peserta dalam mengatasi keterbatasan konektivitas internet. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat persetujuan responden Sebanyak 86,05% responden menyatakan bahwa ketersediaan modul pembelajaran offline sangat membantu proses pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa alternatif akses pembelajaran menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan *blended learning*, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan konektivitas internet. Keberadaan modul offline memungkinkan peserta tetap dapat mengakses materi dan melanjutkan proses belajar meskipun mengalami gangguan jaringan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rasheed et al. (2020) yang menyatakan bahwa penyediaan sumber belajar yang dapat diakses secara fleksibel merupakan strategi efektif dalam mengatasi hambatan teknis pada pembelajaran berbasis teknologi. Secara teoritis, temuan ini memperkuat pandangan Graham (2004) bahwa fleksibilitas akses terhadap sumber belajar merupakan salah satu karakteristik utama yang menentukan keberhasilan implementasi *blended learning*.

Tingginya tingkat persetujuan responden terhadap dukungan teknis panitia (90,69%) menunjukkan bahwa layanan bantuan yang responsif berperan penting dalam menjaga kelancaran proses pembelajaran. Dukungan teknis tidak hanya membantu peserta menyelesaikan kendala penggunaan platform pembelajaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam mengikuti kegiatan belajar berbasis digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Boelens et al. (2017) yang menegaskan bahwa dukungan institusi dan layanan teknis merupakan komponen penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif pada lingkungan *blended learning*. Dari perspektif teori evaluasi pelatihan, dukungan teknis yang memadai merupakan bagian dari kualitas input program yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembelajaran.

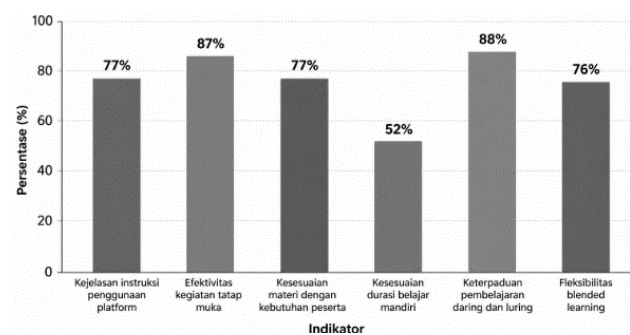
Meskipun demikian, kelancaran pembelajaran secara keseluruhan masih dipengaruhi oleh stabilitas jaringan internet. Hal ini terlihat dari sekitar setengah responden yang menyatakan bahwa pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar tanpa gangguan jaringan, sementara sebagian lainnya masih mengalami kendala konektivitas. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi *blended learning* dalam penyelenggaraan Latsar CPNS di wilayah kepulauan seperti Maluku sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur digital yang tersedia. Secara konseptual, hasil ini sejalan dengan pandangan Garrison & Vaughan (2012) dan Graham (2004) yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan *blended learning* sangat ditentukan oleh kesiapan teknologi, ketersediaan akses internet, serta dukungan sistem pembelajaran yang mampu menjamin fleksibilitas akses bagi peserta. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur digital serta penyediaan alternatif akses pembelajaran seperti modul offline menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan *blended learning* di wilayah kepulauan.

Dimensi Desain Pembelajaran dan Instruksional

Dimensi desain pembelajaran dan instruksional merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi *blended learning*, karena menentukan bagaimana materi, metode, serta aktivitas pembelajaran dirancang untuk mendukung proses belajar yang efektif. Dalam konteks pelatihan aparatur sipil negara, desain pembelajaran yang baik harus mampu mengintegrasikan pembelajaran daring dan tatap muka secara sistematis sehingga peserta memperoleh pengalaman belajar yang fleksibel namun tetap terstruktur. Menurut Garrison & Vaughan (2012), keberhasilan *blended learning* sangat dipengaruhi oleh kualitas desain instruksional yang mampu mengintegrasikan konten, interaksi, serta aktivitas pembelajaran antara lingkungan daring dan tatap muka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap desain pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan Latsar CPNS.

Gambar 2 menunjukkan hasil penilaian responden terhadap dimensi desain pembelajaran dan instruksional dalam pelaksanaan *blended learning* pada Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Maluku. Secara umum, seluruh indikator memperoleh penilaian positif dengan persentase di atas 50%. Indikator keterpaduan antara pembelajaran daring dan luring memperoleh persentase tertinggi (88%), diikuti efektivitas kegiatan tatap muka (87%). Sementara itu, kesesuaian durasi belajar mandiri memperoleh persentase terendah (52%), yang menunjukkan bahwa sebagian peserta masih menghadapi kendala dalam menyesuaikan waktu belajar dengan tugas pekerjaan dan kondisi akses internet. Temuan ini menunjukkan bahwa desain pembelajaran telah berjalan dengan baik, meskipun pengaturan beban belajar mandiri masih perlu dioptimalkan.



Gambar 2. Hasil Penilaian Responden pada Dimensi Desain Pembelajaran dan Instruksional

Sumber: Hasil olahan data penelitian (2025)

Berdasarkan Gambar 2, indikator keterpaduan pembelajaran daring dan luring (88%) serta efektivitas kegiatan tatap muka (87%) memperoleh penilaian tertinggi dari responden. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi antara pembelajaran berbasis teknologi dan pembelajaran klasikal telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pelatihan. Sebaliknya, indikator kesesuaian durasi belajar mandiri memperoleh nilai terendah (52%), yang mengindikasikan perlunya penyesuaian beban belajar dengan kondisi peserta, terutama pada wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan akses internet. Hasil ini memperkuat pandangan Garrison dan Vaughan (2012) bahwa keberhasilan *blended learning* sangat dipengaruhi oleh kualitas desain instruksional yang mampu mengintegrasikan fleksibilitas belajar dengan kebutuhan peserta secara kontekstual.

Pada indikator kejelasan instruksi penggunaan platform pembelajaran, Sebanyak 77% responden menyatakan

bahwa instruksi penggunaan platform pembelajaran mudah dipahami. Temuan ini menunjukkan bahwa desain instruksional yang diterapkan telah mampu memfasilitasi proses belajar mandiri peserta. Kejelasan instruksi menjadi faktor penting dalam *blended learning* karena memengaruhi kemampuan peserta untuk menavigasi materi dan aktivitas pembelajaran secara mandiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ansar et al. (2023) yang menunjukkan bahwa struktur pembelajaran yang jelas berkontribusi terhadap peningkatan keterlibatan peserta dalam pembelajaran daring. Secara teoritis, kondisi tersebut memperkuat pandangan Garrison dan Vaughan (2012) bahwa desain instruksional yang baik merupakan fondasi utama keberhasilan *blended learning*.

Sebanyak 87% responden menilai bahwa kegiatan tatap muka efektif dalam membantu memahami materi yang sulit dipahami melalui pembelajaran mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi langsung masih memiliki peran strategis dalam memperdalam pemahaman konseptual peserta. Pembelajaran tatap muka memungkinkan terjadinya klarifikasi materi, diskusi mendalam, dan umpan balik langsung yang tidak selalu dapat diperoleh melalui pembelajaran daring. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hidayati et al. (2023) yang menemukan bahwa kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka mampu meningkatkan kualitas pemahaman peserta. Secara teoritis, temuan ini mendukung konsep *blended learning* yang menempatkan interaksi tatap muka sebagai sarana memperkuat pengalaman belajar yang diperoleh secara daring.

Selanjutnya, pada indikator kesesuaian materi daring dengan kebutuhan pelatihan di wilayah kepulauan, sebanyak 77% responden juga menyatakan setuju dan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa materi pembelajaran yang disediakan dinilai relevan dengan kebutuhan peserta yang berasal dari wilayah kepulauan. Relevansi materi merupakan prinsip penting dalam desain pembelajaran karena materi yang kontekstual akan lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh peserta dalam lingkungan kerja mereka (Graham, 2004).

Meskipun demikian, hasil penelitian pada indikator kesesuaian durasi belajar mandiri dengan waktu dan kuota data peserta menunjukkan respons yang lebih beragam. Sebanyak 52% responden menyatakan setuju dan sangat setuju, namun 29% responden menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian peserta masih merasakan tantangan dalam menyesuaikan durasi pembelajaran mandiri dengan waktu kerja serta keterbatasan kuota data internet. Kondisi ini merupakan fenomena yang cukup umum dalam pembelajaran daring, terutama pada wilayah dengan keterbatasan akses internet.

Di sisi lain, tingkat persetujuan yang sangat tinggi terlihat pada indikator keterpaduan antara pembelajaran daring dan aktivitas luring. Sebanyak 88% responden menyatakan bahwa pembelajaran daring dan luring telah terintegrasi dengan baik. Temuan ini menunjukkan bahwa desain pembelajaran yang diterapkan mampu menciptakan kesinambungan antara kegiatan belajar mandiri dan pembelajaran klasikal. Integrasi yang baik memungkinkan peserta memperoleh pengalaman belajar yang lebih utuh karena materi yang dipelajari secara daring dapat diperdalam melalui diskusi dan praktik pada sesi tatap muka. Hasil ini sejalan dengan penelitian Bilqis (2025) yang menunjukkan bahwa keterpaduan berbagai moda pembelajaran berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelatihan. Menurut Garrison dan Vaughan (2012), integrasi yang harmonis antara pembelajaran daring dan tatap muka merupakan karakteristik utama *blended learning* yang efektif.

Selain itu, pada indikator kesesuaian fleksibilitas *blended learning* dengan kondisi wilayah peserta, sebanyak 76% responden juga memberikan penilaian positif. Hal ini menunjukkan bahwa model *blended learning* dinilai cukup fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kondisi geografis peserta yang berasal dari wilayah kepulauan. Fleksibilitas tersebut memungkinkan peserta untuk tetap mengikuti pembelajaran tanpa harus meninggalkan tempat tugas dalam waktu yang lama, sehingga sangat relevan diterapkan pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan jarak geografis yang cukup jauh.

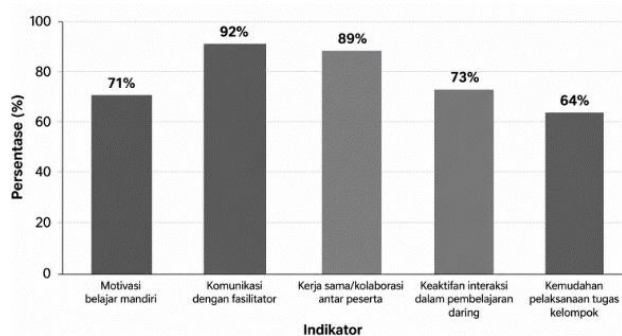
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pembelajaran dan instruksional dalam pelaksanaan *blended learning* pada Latsar CPNS di Provinsi Maluku telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat persetujuan responden terhadap kejelasan instruksi pembelajaran, efektivitas kegiatan tatap muka, relevansi materi pembelajaran, serta keterpaduan antara pembelajaran daring dan luring. Meskipun demikian, pengaturan durasi pembelajaran mandiri masih perlu disesuaikan dengan kondisi peserta agar tidak menimbulkan beban tambahan terkait keterbatasan waktu dan akses internet. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa desain instruksional yang tepat merupakan kunci keberhasilan implementasi *blended learning*, terutama dalam konteks pelatihan aparatur di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan infrastruktur yang beragam.

Dimensi Kemandirian dan Interaksi

Dimensi kemandirian dan interaksi menjadi aspek penting dalam implementasi *blended learning*, karena mencerminkan kemampuan peserta dalam mengelola pembelajaran secara mandiri sekaligus membangun

interaksi dengan fasilitator dan sesama peserta. Dalam konteks ini, pembelajaran yang efektif ditandai oleh keseimbangan antara *self-directed learning* dan *collaborative learning* (Garrison & Vaughan, 2012b).

Gambar 3 menunjukkan hasil penilaian responden terhadap dimensi kemandirian dan interaksi dalam pelaksanaan *blended learning* pada Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Maluku. Secara umum, seluruh indikator memperoleh penilaian positif dengan persentase di atas 60%. Indikator komunikasi dengan fasilitator memperoleh persentase tertinggi (92%), diikuti kerja sama antar peserta melalui LMS (89%). Sementara itu, indikator kemudahan pelaksanaan tugas kelompok memperoleh persentase terendah (64%), yang menunjukkan bahwa koordinasi dan kolaborasi masih menghadapi tantangan tertentu, terutama terkait perbedaan lokasi dan kualitas jaringan internet di wilayah kepulauan.



Gambar 3. Hasil Penilaian Responden pada Dimensi Kemandirian dan Interaksi

Sumber: Hasil olahan data penelitian (2025)

Berdasarkan Gambar 3, indikator komunikasi dengan fasilitator memperoleh penilaian tertinggi (92%), yang menunjukkan bahwa interaksi antara peserta dan fasilitator tetap dapat berlangsung secara efektif meskipun sebagian proses pembelajaran dilakukan secara daring. Tingginya persentase pada indikator kolaborasi peserta (89%) juga menunjukkan bahwa *Learning Management System* (LMS) telah berfungsi tidak hanya sebagai media penyampaian materi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan pertukaran pengetahuan antar peserta. Di sisi lain, indikator kemudahan pelaksanaan tugas kelompok memperoleh persentase yang relatif lebih rendah (64%), mengindikasikan masih adanya kendala koordinasi akibat perbedaan lokasi geografis dan kualitas jaringan internet.

Temuan ini menunjukkan bahwa *blended learning* mampu mendorong kemandirian belajar sekaligus memfasilitasi interaksi dan kolaborasi peserta secara cukup efektif. Hasil tersebut sejalan dengan pandangan Garrison dan Vaughan (2012) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara *self-directed learning* dan

collaborative learning dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar mandiri peserta tergolong baik, sebanyak 71% responden menyatakan bahwa *blended learning* mampu meningkatkan motivasi belajar mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengatur waktu, strategi, dan kecepatan belajar sesuai kebutuhan masing-masing. Kemandirian belajar merupakan salah satu kompetensi penting dalam pembelajaran abad ke-21 karena mendorong peserta menjadi pembelajar yang aktif dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Husamah (2014) yang menunjukkan bahwa *blended learning* dapat memperkuat kemampuan *self-directed learning* peserta. Secara teoritis, kondisi ini memperkuat paradigma *learner-centered learning* yang menjadi landasan utama pembelajaran berbasis teknologi.

Pada aspek komunikasi dengan fasilitator, tingginya tingkat persetujuan responden terhadap efektivitas komunikasi dengan fasilitator (92%) menunjukkan bahwa interaksi pembelajaran tetap dapat berlangsung secara optimal meskipun sebagian proses dilakukan secara daring. Komunikasi yang baik memungkinkan peserta memperoleh bimbingan, klarifikasi materi, dan umpan balik secara tepat waktu. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ansar et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kualitas interaksi antara peserta dan fasilitator berpengaruh positif terhadap keterlibatan peserta dalam pembelajaran daring.

Keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Salah satunya, keberhasilan *blended learning* sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun *teaching presence* yang kuat dalam lingkungan belajar. Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Garrison dan Vaughan (2012).

Selanjutnya, kerja sama antar peserta melalui LMS juga dinilai sangat baik, sebanyak 89% responden menilai bahwa LMS mampu mendukung kerja sama dan kolaborasi antar peserta. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian materi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan pertukaran pengetahuan. Kolaborasi yang terbangun selama proses pembelajaran memungkinkan peserta saling berbagi pengalaman dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Boelens et al. (2017) yang menegaskan pentingnya interaksi sosial dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna pada lingkungan *blended learning*.

Sementara itu, keaktifan interaksi dalam pembelajaran daring berada pada kategori cukup baik (73%), meskipun masih terdapat responden yang bersikap netral. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi peserta dalam diskusi dan interaksi belum sepenuhnya optimal, yang dapat dipengaruhi oleh faktor teknis maupun kebiasaan belajar yang masih berorientasi pada pembelajaran konvensional.

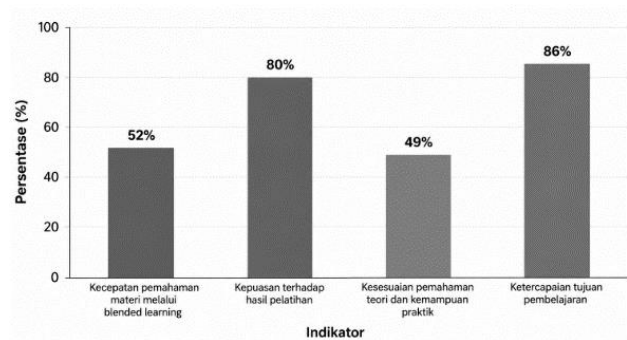
Pada indikator kemudahan pelaksanaan tugas kelompok, tingkat persetujuan sebesar 64% menunjukkan bahwa kolaborasi tetap dapat dilakukan meskipun peserta berada di lokasi yang berbeda. Namun, kendala koordinasi dan perbedaan kondisi jaringan internet masih menjadi tantangan, khususnya dalam konteks wilayah kepulauan.

Secara keseluruhan, dimensi kemandirian dan interaksi menunjukkan bahwa penerapan *blended learning* telah mampu mendorong kemandirian belajar serta memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi secara cukup efektif. Meskipun demikian, optimalisasi partisipasi interaktif dan pelaksanaan kerja kelompok masih memerlukan perhatian, terutama dalam menyesuaikan dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang beragam. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan *blended learning* tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan peserta dalam beradaptasi dengan pola pembelajaran mandiri dan kolaboratif.

Dimensi Dampak Hasil Pelatihan

Dimensi dampak hasil pembelajaran menunjukkan sejauh mana penerapan *blended learning* mampu meningkatkan pemahaman, kepuasan, serta pencapaian tujuan pembelajaran peserta. Dalam evaluasi pelatihan, keberhasilan tidak hanya diukur dari proses, tetapi juga dari hasil yang dicapai, baik dalam aspek kognitif maupun kemampuan penerapan (Kirkpatrick, 2008)

Gambar 4 menunjukkan hasil penilaian responden terhadap dimensi dampak hasil pelatihan dalam penerapan *blended learning* pada Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Maluku. Secara umum, mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap dampak pembelajaran yang diperoleh. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran memperoleh persentase tertinggi (86%), diikuti kepuasan terhadap hasil pelatihan (80%). Namun demikian, indikator kesesuaian antara pemahaman teori dan kemampuan praktik memperoleh persentase terendah (49%), yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara penguasaan konsep dan penerapannya dalam konteks pekerjaan.



Gambar 4. Hasil Penilaian Responden pada Dimensi Dampak Hasil Pelatihan

Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2025

Berdasarkan Gambar 4, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran memperoleh nilai tertinggi (86%), yang menunjukkan bahwa *blended learning* secara umum mampu mendukung pencapaian kompetensi yang ditargetkan dalam Pelatihan Dasar CPNS. Tingginya tingkat kepuasan peserta terhadap hasil pelatihan (80%) juga mengindikasikan bahwa kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka mampu memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Namun demikian, indikator kesesuaian antara pemahaman teori dan kemampuan praktik memperoleh persentase yang relatif lebih rendah (49%). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman konseptual belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan penerapan dalam situasi kerja nyata. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan aktivitas praktik, studi kasus, simulasi, dan pembelajaran berbasis pengalaman dalam desain *blended learning*. Hasil ini sejalan dengan Garrison dan Vaughan (2012) yang menekankan pentingnya integrasi antara pemahaman konseptual dan penerapan praktis agar pembelajaran menghasilkan dampak yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan pemahaman materi melalui *blended learning* dinilai cukup baik, dengan 52% responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Fleksibilitas akses materi memungkinkan peserta belajar secara mandiri dan berulang, meskipun sebagian responden masih belum merasakan peningkatan yang signifikan, yang tercermin dari tingginya persentase netral dan ketidaksetujuan. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pemahaman masih dipengaruhi oleh kesiapan peserta dan kondisi teknis, seperti kualitas jaringan internet (Graham, 2004).

Pada indikator kepuasan terhadap hasil pelatihan, sebanyak 80% responden menyatakan puas terhadap hasil pelatihan yang diperoleh melalui metode *blended learning*. Tingginya tingkat kepuasan ini menunjukkan bahwa model pembelajaran yang diterapkan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan peserta selama mengikuti pelatihan.

Kepuasan peserta merupakan indikator penting dalam evaluasi pelatihan karena mencerminkan persepsi terhadap kualitas layanan pembelajaran yang diberikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Bilqis (2025) yang menemukan bahwa *blended learning* berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan peserta pelatihan. Dalam perspektif Kirkpatrick (2008), kepuasan peserta merupakan salah satu indikator awal keberhasilan program pelatihan.

Sementara itu, kesesuaian antara pemahaman teori dan kemampuan praktik menunjukkan hasil yang lebih moderat, dengan 49% responden menyatakan setuju dan sangat setuju, serta 30% netral. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman konseptual belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan penerapan. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan praktik langsung atau kurangnya interaksi aplikatif dalam pembelajaran daring. Menurut (Garrison & Vaughan, 2012b), desain *blended learning* perlu mengintegrasikan aktivitas konseptual dan praktik agar pembelajaran lebih bermakna.

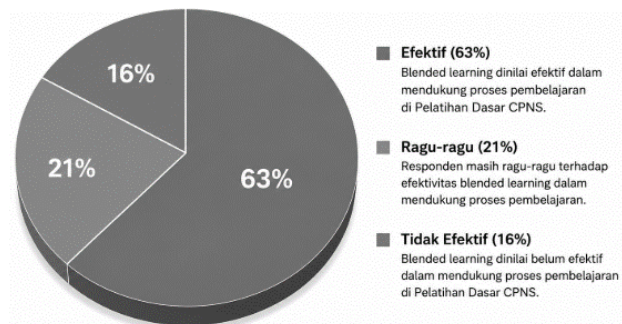
Pada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, hasil penelitian menunjukkan capaian yang sangat baik, sebanyak 86% responden menyatakan bahwa tujuan pembelajaran dapat dicapai melalui penerapan *blended learning*. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka mampu mendukung pencapaian kompetensi yang ditargetkan dalam Pelatihan Dasar CPNS. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa desain pembelajaran yang digunakan telah mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta dalam konteks wilayah kepulauan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hidayati et al. (2023) yang menemukan bahwa *blended learning* memberikan dampak positif terhadap pencapaian hasil belajar. Secara teoritis, temuan ini menguatkan pandangan bahwa efektivitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh metode yang digunakan, tetapi juga oleh kesesuaian desain pembelajaran dengan karakteristik peserta dan lingkungan belajar.

Secara keseluruhan, dimensi dampak hasil pembelajaran menunjukkan bahwa *blended learning* cukup efektif dalam meningkatkan kepuasan peserta dan pencapaian tujuan pembelajaran. Namun, optimalisasi masih diperlukan pada aspek percepatan pemahaman dan penguatan keterkaitan antara teori dan praktik. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan *blended learning* tidak hanya bergantung pada fleksibilitas akses, tetapi juga pada desain pembelajaran yang mampu menghubungkan pemahaman konseptual dengan penerapan praktis.

Efektivitas Metode *Blended learning*

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat efektivitas penerapan metode *blended learning* dalam Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Maluku,

dilakukan analisis integratif terhadap seluruh dimensi penelitian yang meliputi aspek aksesibilitas dan infrastruktur, desain pembelajaran dan instruksional, kemandirian dan interaksi peserta, serta dampak hasil pembelajaran. Hasil pengolahan data dari keempat dimensi tersebut kemudian dirangkum untuk melihat persepsi umum responden terhadap efektivitas metode *blended learning* secara keseluruhan. Adapun distribusi penilaian responden terhadap tingkat efektivitas *blended learning* disajikan pada gambar berikut.



Gambar 5. Tingkat Efektivitas *Blended learning* dalam Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Maluku
Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditunjukkan pada diagram, tingkat efektivitas penerapan *blended learning* dalam Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Maluku didominasi oleh penilaian positif dari responden. Sebanyak 63% responden menyatakan bahwa *blended learning* efektif diterapkan dalam penyelenggaraan Latsar CPNS di Provinsi Maluku. Temuan ini menunjukkan bahwa model pembelajaran tersebut mampu menjawab tantangan geografis wilayah kepulauan melalui penyediaan akses belajar yang lebih fleksibel dan efisien. Efektivitas tersebut merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, seperti desain pembelajaran yang baik, dukungan teknologi, komunikasi yang efektif, serta kemampuan peserta dalam beradaptasi dengan pembelajaran digital. Hasil ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa *blended learning* mampu meningkatkan kualitas pengalaman belajar dan hasil pelatihan peserta (Ansar et al., 2023; Bilqis, 2025). Secara teoritis, temuan ini memperkuat pandangan Graham (2004) bahwa *blended learning* merupakan pendekatan yang adaptif terhadap berbagai konteks pembelajaran, termasuk wilayah yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur, sementara 21% responden menyatakan ragu-ragu, dan 16% menyatakan tidak efektif. Komposisi ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan *blended learning* telah memberikan dampak yang baik dalam mendukung proses pembelajaran, meskipun masih terdapat

sebagian peserta yang belum merasakan efektivitasnya secara optimal.

Tingginya persentase responden yang menyatakan “efektif” mencerminkan bahwa kombinasi antara pembelajaran daring dan tatap muka mampu menjawab kebutuhan pelatihan, khususnya dalam konteks wilayah kepulauan. Fleksibilitas akses pembelajaran, kemudahan komunikasi, serta keterpaduan antara materi daring dan luring menjadi faktor utama yang mendukung efektivitas tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Graham (2004) yang menyatakan bahwa *blended learning* memungkinkan integrasi keunggulan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring sehingga dapat meningkatkan kualitas pengalaman belajar peserta.

Namun demikian, keberadaan 21% responden yang ragu-ragu menunjukkan bahwa efektivitas metode ini belum dirasakan secara merata. Keraguan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur jaringan internet, variasi kemampuan literasi digital peserta, serta perbedaan gaya belajar. Selain itu, 16% responden yang menyatakan tidak efektif mengindikasikan masih adanya kendala nyata dalam implementasi *blended learning*, terutama pada aspek teknis dan kesiapan lingkungan belajar. Kondisi ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa wilayah kepulauan seperti Maluku memiliki tantangan dalam hal konektivitas dan pemerataan akses teknologi.

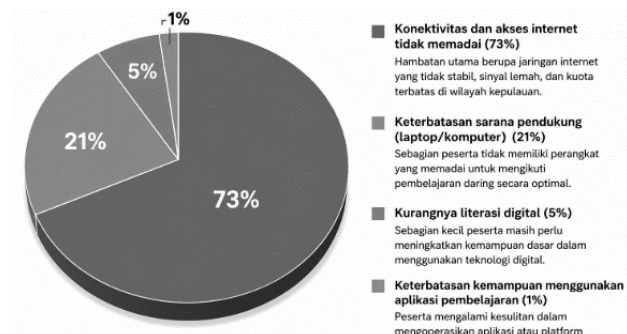
Jika dikaitkan dengan hasil analisis pada setiap dimensi sebelumnya, efektivitas *blended learning* ini merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor, yaitu aksesibilitas dan infrastruktur yang cukup memadai namun belum merata, desain pembelajaran yang relatif baik dan terstruktur, tingkat kemandirian dan interaksi peserta yang cukup tinggi, serta dampak hasil pembelajaran yang positif meskipun belum optimal pada aspek praktik. Dengan demikian, *blended learning* dapat dikategorikan sebagai cukup efektif hingga efektif dalam penyelenggaraan Latsar CPNS di Provinsi Maluku.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat konsep *blended learning* sebagai pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan adaptif terhadap berbagai kondisi geografis dan kebutuhan peserta (Garrison & Vaughan, 2012b). Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, diperlukan peningkatan pada aspek infrastruktur digital, penguatan desain pembelajaran yang lebih aplikatif, serta peningkatan kesiapan peserta dalam mengikuti pembelajaran berbasis teknologi.

Tantangan dan Hambatan

Untuk melengkapi analisis mengenai efektivitas penerapan *blended learning* dalam Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Maluku, penting untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi selama

proses implementasi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun keterbatasan pelaksanaan *blended learning*, khususnya dalam konteks wilayah kepulauan. Adapun distribusi persepsi responden terkait tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan *blended learning* disajikan pada gambar berikut.



Gambar 6. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan *Blended learning*

Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2025

Berdasarkan hasil data pada diagram, hambatan utama dalam pelaksanaan *blended learning* didominasi oleh konektivitas dan akses internet yang tidak memadai, dengan persentase sebesar 73%. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan masih menjadi faktor penghambat utama dalam pembelajaran berbasis daring di wilayah kepulauan seperti Maluku. Kondisi geografis yang tersebar dan keterbatasan jaringan telekomunikasi menyebabkan akses internet tidak stabil, sehingga berdampak langsung pada kelancaran proses pembelajaran, terutama pada sesi *synchronous*. Temuan ini sejalan dengan pendapat Graham (2004) yang menyatakan bahwa kesiapan infrastruktur teknologi merupakan prasyarat utama dalam keberhasilan implementasi *blended learning*.

Selain itu, keterbatasan sarana pendukung seperti laptop atau komputer juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dengan persentase sebesar 21%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua peserta memiliki fasilitas perangkat yang memadai untuk mengikuti pembelajaran daring secara optimal. Ketersediaan perangkat menjadi faktor penting dalam mendukung akses terhadap *Learning Management System* (LMS) dan berbagai aktivitas pembelajaran digital. Menurut Garrison & Vaughan (2012), lingkungan belajar berbasis teknologi memerlukan dukungan perangkat yang memadai agar interaksi dan akses pembelajaran dapat berjalan secara efektif.

Sementara itu, kurangnya literasi digital dan keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi/aplikasi pembelajaran masing-masing hanya

menyumbang hambatan yang relatif kecil, yaitu sebesar 5% dan 1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sudah memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi pembelajaran, sehingga aspek literasi digital bukan menjadi hambatan utama dalam konteks penelitian ini. Namun demikian, faktor ini tetap perlu diperhatikan karena kemampuan penggunaan teknologi yang baik akan mendukung optimalisasi proses pembelajaran daring.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi *blended learning* di wilayah kepulauan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi, dibandingkan dengan faktor internal peserta. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan *blended learning* tidak hanya ditentukan oleh desain pembelajaran dan kesiapan peserta, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan sistem dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemerataan akses internet dan penyediaan sarana pendukung pembelajaran guna mengoptimalkan penerapan *blended learning* di wilayah kepulauan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *blended learning* dalam Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Maluku secara umum berada pada kategori cukup efektif hingga efektif. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi penilaian positif responden terhadap keempat dimensi yang dikaji, yaitu aksesibilitas dan infrastruktur, desain pembelajaran dan instruksional, kemandirian dan interaksi peserta, serta dampak hasil pembelajaran.

Pada dimensi aksesibilitas dan infrastruktur, pelaksanaan *blended learning* dinilai cukup baik meskipun masih terkendala oleh stabilitas jaringan internet di wilayah kepulauan. Dimensi desain pembelajaran dan instruksional menunjukkan hasil yang baik, terutama pada aspek kejelasan instruksi, efektivitas pembelajaran tatap muka, serta keterpaduan antara pembelajaran daring dan luring. Pada dimensi kemandirian dan interaksi, *blended learning* mampu mendorong motivasi belajar mandiri serta menjaga komunikasi dan kolaborasi antar peserta dan fasilitator. Sementara itu, pada dimensi dampak hasil pembelajaran, metode ini terbukti mampu meningkatkan kepuasan peserta dan ketercapaian tujuan pembelajaran, meskipun masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teori dan kemampuan praktik.

Secara keseluruhan, tingkat efektivitas *blended learning* ditunjukkan oleh 63% responden yang menyatakan efektif. Namun demikian, masih terdapat 21%

responden yang ragu-ragu dan 16% yang menilai belum efektif, yang mengindikasikan bahwa implementasi *blended learning* belum sepenuhnya optimal. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan konektivitas internet, keterbatasan sarana pendukung, serta variasi kesiapan peserta. Dengan demikian, efektivitas *blended learning* dalam konteks wilayah kepulauan sangat dipengaruhi oleh faktor infrastruktur, kualitas desain pembelajaran, serta kesiapan peserta dalam mengikuti pembelajaran berbasis digital.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas penerapan *blended learning* dalam Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) perlu memperkuat infrastruktur digital, khususnya melalui pemerataan akses internet di wilayah kepulauan, sehingga proses pembelajaran daring dapat berlangsung secara optimal dan menjangkau seluruh peserta secara merata. Selain penguatan infrastruktur jaringan internet, BPSDM Provinsi Maluku perlu mengoptimalkan penggunaan *Learning Management System* (LMS) yang dirancang untuk beroperasi pada kondisi bandwidth rendah (*low bandwidth*). LMS dengan karakteristik tersebut memungkinkan peserta mengakses materi, pengunduhan bahan ajar, mengerjakan tugas, serta mengikuti aktivitas pembelajaran secara stabil meskipun berada pada wilayah dengan jaringan internet terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar, B. I., Junaidi, J., Maulin, S., Herman, H., Kamaruddin, I., Rahman, A., & Saputra, N. (2023). Blended-Learning Training and Evaluation: A Qualitative Study. *Journal of Intercultural Communication*, 23(4), 155–164. <https://doi.org/10.36923/jicc.v23i4.201>
- Bilqis, R. A. (2025). The Effectiveness of *Blended learning* on Training Participant's Learning Outcomes in The Financial Transaction Reporting Training Program. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.54849/monas.v7i1.233>
- Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2012a). *Blended learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*. In *Blended learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118269558>
- Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2012b). *Blended learning in Higher Education: Framework, Principles,*

and Guidelines. *Blended learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines*, 1–245. <https://doi.org/10.1002/9781118269558>

- Graham, C. R. (2004). *Blended learning systems: Definition, Current Trends, and Future Directions*. In *Handbook of Lended Learning: Global Perspectives, Local Design*. Pfeiffer. <https://www.researchgate.net/publication/258834966>
- Graham, C. R. (2006). *Blended learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions*. In C. J. Bonk & C. R. Graham (Eds.), *The Handbook of Blended learning: Global Perspectives, Local Designs*. Pfeiffer. <https://www.researchgate.net/publication/258834966>
- Hidayati, R. N., Wahyuningsih, B. D., Hariyono, R., & Musadek, A. (2023). Learning Outcomes in *Blended learning* Implementation. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*, 2(3), 1095–1102. <https://doi.org/10.58526/jsret.v2i3.201>
- Hrastinski, S. (2019). What Do We Mean by *Blended learning*? *TechTrends 2019* 63:5, 63(5), 564–569. <https://doi.org/10.1007/S11528-019-00375-5>
- Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2008). *Evaluating Training Programs: The Four Levels*. Berrett-Koehler Publisher, Inc. <https://books.google.co.id/books?id=BJ4QCmvP5rcC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, 1369 (2021). www.peraturan.go.id
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP Model for Evaluation. *International Handbook of Educational Evaluation*, 31–62. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4_4